

RENCANA KINERJA



2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2025 merupakan dokumen indukrencana jangka pendek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Disampaikan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

**KEPALA DINAS LINGKUNGANHIDUP
KABUPATEN GRESIK**



SRI SUBAIDAH, ST., MT
PEMBINA TK. I
NIP.197111131999012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB.GRESIK TAHUN 2024 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup
 Kab.Gresik Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas
 Lingkungan Hidup Kab.Gresik 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 19

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 24

 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

 2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan 26

 2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap
Capaian Program Nasional 27

 2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 27

 2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan 28

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 39

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Visi & Misi
 Kementrian Lingkungan Hidup) 45

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 61

 3.3 Program dan Kegiatan..... 63

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN 59

 4.1 Program dan Kegiatan..... 78

BAB V PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2023 S/D Tahun 2025..... 7

Tabel 2. 2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

Tabel 2. 3 Target & Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2024..... 25

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gresik Dinas Lingkungan Hidup 30

Tabel 3. 1 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
dalam RPJMN Tahun 2025-2029 46

Tabel 3. 2 Dukungan Proyek Strategis Nasional 52

Tabel 3. 3 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis
Perangkat Daerah..... 56

Tabel 3. 4 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa
Timur 2025-2029 60

Tabel 3. 5 Matrik Sinergitas Kinerja RPJMD Kabupaten Gresik dan
RENSTRA 2025- 2029 61

Tabel 3. 6 Target terhadap Indikator Tujuan Dinas LIngkungan Hidup 62

Tabel 3. 7 Target Sasaran Strategis di Dinas Lingkungan Hidup Tahun
2025-2029..... 62

Tabel 3. 8 (T.C-33) Rumusan Rencana Program & Kegiatan Tahun 2026 &
Prakiraan Maju Tahun 2027 67

Tabel 3. 6 Target terhadap Indikator Tujuan Dinas LIngkungan Hidup 61

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2026 79

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dalam urusan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan Review Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2026 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2026 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2026 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026, Selain itu, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2026 juga diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2026, serta Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 didahului dengan penyusunan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2026 yang diselaraskan dengan hasil rapat Forum OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu secara substantive Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengintegrasikan program-program urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dengan penjangkaran aspirasi dari pihak terkait (*stakeholders*) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah:

1. Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah :
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029
14. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
16. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045
17. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
20. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 melalui Musrenbang Kabupaten. RKPD kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2026 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD tahun 2026 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan program dan kegiatan tahun 2026 yang berisi penjelasan- penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2026.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN :MATRIK RENJA OPD TAHUN 2026

Lampiran memuat tabel matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.GRESIK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan sebanyak 8 program, 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Sedangkan tahun 2026, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan sebanyak 8 program, 12 kegiatan dan 29 sub Kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel II.1.

Capaian kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2026, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (tahun 2026) dapat tercapai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 S/D Tahun 2025

	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Target Renstra PD S.D TA 2025	
				Target RENJA PD TA 2024	Realisasi RENJA PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) TA 2024		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Program Urusan LH	100	100	100	100	100,0	100	100	100%
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen	11	11	11	11	100,0	-	-	-
	Jumlah laporan dokumen	28	28	7	7	100,0	7	7	100%
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen	5	5	5	5	100,0	-	-	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	3	3	100,0	3	3	100%
KOORDINASI & PENYUSUNAN	jumlah dokumen	6	6	6	6	100,0	-	-	-

LAPORAN CAPAIAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16	4	4	100	4	4	100%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	73	73	73	100	86	100	116%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	73	73	100	86	100	116%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah fasilitas perkantoran yang terpenuhi	5	5	5	5	100	-	-	-
	Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan internal PD yang terlayani	5	5	5	5	100	5	5	100%
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah alat	90	90	90	90	100	-	-	-
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20	-	-	-	14	12	86%

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Barang Cetak	14	14	14	14	100	-	-	-
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	6	3	3	100	1	1	100%
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan	11	11	11	11	100	-	-	-
	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Undang-Undang yang disediakan	17	17	10	10	100	-	-	-
PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Manmin dann Perdin	5	5	12	12	100	-	-	-
	Jumlah Jenis Manmin dan Perdin	22	22			100	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	13	13	7	7	100	11	11	100

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik konsultasi SKPD	1	1	-	-	-	1	1	100%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah rekening	3	3	3	3	100	-	-	-
	Jumlah rekening	7	7	7	7	100	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	100	100	100	7	7	100%
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah rekening	3	3	7	7	100	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang disediakan	3	3	7	7	100	48	48	100%
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Petugas	7	7	15	15	100	-	-	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	4	4	100	84	84	100%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah aset terpelihara	13	13	13	13	100	-	-	-

		2	2	2	2	100	-	-	-
	Jumlah aset terpelihara	381	381	-	-	-	340	340	100%
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan	7	7	125	125	100	-	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240	240	-	-	-	127	127	100%
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan	6	6	70	70	100	-	-	-
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	140	-	-	-	81	81	100%
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	3	3	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Air	65	65	50	50	100	60	60	100%
	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Udara								
PENCEGAHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN	Jumlah Uji	67	67	67	67	100	-	-	-

HIDUP KAB. GRESIK	Jumlah Kajian	9	9	3	3	100	-	-	-
	Jumlah alat	13	13	13	13	100	-	-	-
	Jumlah bahan kimia	6	6	6	6	100	-	-	-
	Jumlah bahan kimia	1000	1000			100	800	800	100%
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT	Jumlah uji	67	67	69	69	100	-	-	-
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	200	200	37	37	100	60	60	100%
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	jumlah kajian	3	3	3	3	100	-	-	-
	Jumlah peserta	125	125	125	125	100	-	-	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	215	215	-	-	-	12	12	100%
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah alat	13	13	13	13	100	-	-	-
	Jumlah bahan kimia	6	6	6	6	100	-	-	-
	jumlah peserta sertifikasi & kalibrasi	10	10	10	10	100	-	-	-
	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3370	3370	6	6	100	800	800	100%

PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah Unit Bangunan	1	1	1	1	100	-	-	-
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR	Jumlah Unit Bangunan	2	2	1	1	100	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan Luas RTH	3	3	2	2	100,00	2,5	2,5	100%
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Luas Penambahan RTH	4	4	129	129	100	-	-	-
	Luas RTH yang terkelola	148,9	148,9	-	-	-	142,43	142,43	100%
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah Petugas RTH	196	196	196	196	100	-	-	-
	Jumlah lokasi terkelola	98	98	98	98	100	-	-	-
	Jumlah RT yang dikeola lingkup kewenangan Kab/Kota	148,9	148,9	129,48	129,48	100	142,43	142,43	100%
PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA	Jumlah Lokasi RTH/ Taman	5	5	5	5	100	-	-	-
	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1554,05	1554,05	1554,05	1554,05	100	-	-	-
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	350	350	-	-	-	3	3	100%
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah Lokasi KEHATI	5	5	6	6	100	-	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	103	103	-	-	-	67	67	100%

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	60	60	40	40	53,13	55	55	100%
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha yang terawasi	350	350	199	199	100,00	90	90	100%
FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah usaha yang terawasi	160	160	199	199	100	-	-	-
	Jumlah Fasilitasi persetujuan izin/pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terntegrasi secara elektronik	350	350	285	285	100,00	75	75	100%
PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	65	65	50	50	100	60	60	100%
PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP USAHA & KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Jumlah Usaha yang berijin LH dan terawasi secara berkala	480	480	345	345	100	-	-	-
				-	-	-	165	165	100%
FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH	Jumlah Usaha yang berijin LH	200	200	200	200	100	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan SLO yang diberikan	260	260	-	-	-	50	50	100%

PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah usaha yang terawasi	101	101	145	145	100	-	-	-
	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, SLO oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	85	85	44	44	100	-	-	-
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	280	280	-	-	-	60	60	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	60	60	30	30	100	55	55	100%
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Jumlah kelompok atau lembaga yang aktif terbina	60	60	30	30	100,00	180	180	100%
PENINGKATAN KAPASITAS & KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah kelompok yang terbina	400	400	400	400	100	-	-	-
	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	180	180	400	400	100,00	180	180	100%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	60	60	30	30	100	55,0	55,0	100%

PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH) KAB/KOTA	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH) KAB/KOTA	60	60	30	30	100	30	30	100%
	Jumlah Aduan	40	40	45	45	100	-	-	-
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yg Ditindaklanjuti	110	110	-	-	-	30	30	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	58	58	68	68	100	57,0	57,0	100%
	Persentase Pengurangan Sampah	12	12	11	11	100	11,0	11,0	100%
	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	410	410	231	231	100	410	410	100%
	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	170	170	125	125	100	164,0	164,0	100%
	Jumlah TPA/TPST yang terbangun dan terkelola	3	3	3	3	100,00	4,0	4,0	100%
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah lokasi yang tertangani	100	100	18	18	100	18	18	100%
	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah	19	19	19	19	100	20	20	100%
	Jumlah sarpras yang layak	15	15	15	15	100	18	18	100%

PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (KEBERSIHAN)	Jumlah petugas	205	205	205	205	100	-	-	-
	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	210	210	205	205	100	-	-	-
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	158	158	-	-	-	160	160	100%
PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (UPT TPA)	Lokasi TPA	1	1	1	1	100	-	-	-
	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	210	210	210	210	1	0	0	0
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	210	210	-	-	-	210	210	100%
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Bank Sampah	301	301	14	14	100	-	-	-
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30	30	27	27	100	20	20	100%

KOORDINASI & SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sarpras	51	51	34	34	100	-	-	-
	Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Persampahan	3	3	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15	15	34	34	100,00	18	18	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

“Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan”

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
3. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
4. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
5. Pembinaan dan pengendalian teknik analisis mengenai dampak lingkungan;
6. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
7. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemantauan perijinan dibidang Sumber Daya Alam;
8. Pelaksanaan pengelolaan urusak kebersihan dan persampahan
9. Pelaksanaan pengelolaan Kenakeragaman hayati dan RTH
10. Pengelolaan Pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.

Di Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) sasaran Strategis dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD yaitu meningkatnya upaya pengendalian penurunan kualitas lingkungan hidup dan terwujudnya pengelolaan lingkungan

hidup yang bersih dan indah. Dimana di Tahun 2024 dari 2(dua) sasaran strategis tersebut direalisasikan dalam 8 program, 12 Kegiatan 27 Sub kegiatan, sedangkan di Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 memuat beberapa hal yaitu diantaranya :

1. Mendukung 3 Misi dari RPJMD yaitu
 - a. Misi 1 = Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
 - b. Misi 3 = Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
 - c. Misi 5 = Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2. Memiliki 5 Sasasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama
3. terdapat 8 program, 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja TA 2024 dan prakiraan capaian kinerja TA 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Taget Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kualitas Air	50,3	50,4	50,5	77,93	49,38	50	50,5	50	Masih banyaknya air limbah domestik pemukiman yang belum terkelola dengan IPAL Komunal
2	Indeks kualitas Udara	83,74	83,84	83,94	61,68	81,24	82,94	83,94	82,94	Kurangnya pemantauan gas buang emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Gresik dan Masih banyaknya gas rumah kaca yang belum terkelola dengan baik
3	Indeks kualitas Lahan	34,74	35,52	36,32	47,54	32,17	35,3	36,32	35,3	Kewenangan pesisir yang tidak berada di kab/kota
4	Prosentase	2%	2%	2%	-	9,64%	9,64%	5%	-	Adanya inovasi untuk pengurangan dan pengelolaan

No	Indikator	Taget Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	RTH									persampahan dari sumbernya secara mandiri
5	Prosentase Pengelolaan Sampah	62%	63%	64%	-	77,20%	77,20%	64%	-	Adanya peningkatan taman yang terbangun sebagai RTH

Adapun evaluasi secara keseluruhan dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (Lima) indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Penduduk, Jumlah Pelaku Usaha dan Alat Transportasi yang berdampak pada kualitas LH
2. Ketidakseimbangan sumber daya dukung baik anggaran maupun SDM pengawas/pemantau dan Pembina / pengendali dengan pelaku / kelompok usaha / kegiatan yang semakin meningkat dan rendahnya kapasitas proses pengendalian yang kurang mewakili baik secara waktu
3. dan sarana prasarana sehingga data yang diperoleh kurang optimal.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat untuk aktif secara mandiri dalam pengelolaan lingkungan hidup Adanya peningkatan upaya pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelolaan lingkungan
5. Upaya pemanfaatan mesin RDF untuk pengelolaan sampah menjadi briket
6. Adanya penambahan 2 lokasi TPS3R di Belahan Rejo dan di Pulau Bawean
7. Adanya partisipasi aktif dalam organisasi Bank Sampah di Kab.Gresik
8. Adanya implementasi pengurangan sampah plastik sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2021
9. Adanya penambahan RTH di beberapa titik kabupaten Gresik

Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Peningkatan upaya pengendalian kualitas lingkungan
2. Peningkatan upaya pemantauan dan pengawasan
3. Peningkatan upaya pembinaan dan penyuluhan

terhadap pengelolaan lingkungan

4. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperbaiki dan pemulihan kualitas lingkungan
5. Peningkatan upaya fasilitasi pengelolaan rekomendasi/ijin pengelolaan LH
6. Peningkatan upaya pelayanan pengelolaan pengendalian kualitas lingkungan hidup

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi pengelolaan persampahan, pengelolaan RTH dan peningkatan peran serta masyarakat dalam taat terhadap peraturan pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun isu strategis di Tahun 2026 untuk urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Sampah dan Pendeknya usia TPA ngipik
2. Alih Fungsi Lahan
3. Jumlah Pelaku Usaha
4. Jumlah Penduduk
5. Penyesuaian Standart IKLH secara Nasional
6. Kelayakan atas ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
7. Pemutakhiran regulasi terkait peningkatan retribusi
8. Pemutakhiran Regulasi terkait pemberian rekomendasi / persetujuan lingkungan
9. Kapasitas SDM Pelayanan baik teknis dilapangan maupun administrator
10. Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri
11. Upah Pekerja sebagai SDM pelayanan
12. Jumlah Transportasi

13.Kurangnya RTH

14.Kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk pengelolaan lingkungan

15. Perluasan Kinerja untuk mendukung Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai Misi Pertama dan Misi Kelima

16. Berkembangnya Perkembangan Zaman yaitu Fasilitas dan Sarana Prsarana yng berbasis Teknologi

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik memiliki 2 (dua) sasaran strategis yakni Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah. Tingkat kinerja dari Dinas Lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Target & Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2024

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S.1	Meningkatnya Upaya Pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50,4	50	99,21%
		Indeks kualitas Udara	83,84	82,94	98,93%
		Indeks Kualitas Lahan	35,52	35,3	99,38%
S.2	Terwujudnya pengelolaan Lingkungan yang bersih dan Indah	Prosentase Pengelolaan Sampah	77,20	77,21	100%
		Prosentase Luas RTH	9,64	11,65%	120%

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun Permasalahan/hambatan dalam pengelolaan isu-isu strategis tersebut dalam prosesnya memiliki banyak kendala dan hambatan yaitu :

1. Urbanisasi dan transmigrasi penduduk dari luar ke dalam daerah yang sulit terkendali mengakibatkan banyak perubahan penggunaan lahan tanpa diimbangi upaya perbaikan lingkungannyasecara optimal;
2. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka banyak kebutuhan dan kepentingan an sehingga banyak bermunculan usaha/kegiatan dalam pemenuhan kebutu han tersebut;
3. Adanya SE KLHK NO 129 Tahun 2025 terkait penyesuaian standaet IKLH maka ada ketimpangan yang cukup signiikan dari tahun 2025-2029 ke 2021-2026;
4. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan perbaikan sarana prsarana dan fasilitas pelayanan;
5. Proses penetapan regulasi terbaru terkait retrbusi masih berjalan;
6. Adanya penyesuaian regulasi yang terpusat terkait pemberrian persetujuan rekomendasi SPPL/UKL/UPL masih belum sesuai dengan kondisi daerah;
7. Rendahnya kapasitas SD pelayanan baik yang berada dilapanagan maupun administrator , jumlah yang minim dan pengembangan kompetensi SDM yang kurang optimal;
8. Kepedulian masyarakat terkait pengelolaan lingkungan masih belum jadi prioritas karena dampak lingkungan yang tidak tampak secara langsung;
9. Kemampuan daerah yang terbatas sehingga

upah pekerja terutama dilapangan masih cukup rendah;

10. Jumlah penduduk yang meningkat disertai dengan peningkatan jumlah transportasi tapi kurang didukung fasilitas pengendali pencemaran udara;
11. Kondisi alam yang tidak menentu yaitu periode musim hujan dan musim kemarau;
12. Tingginya ego sektoral sebagian stake holder untuk berkolaborasi untuk mengelola lingkungan;
13. Keterbatasan anggaran dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan sehingga proses penyesuaian dan penerimaan masyarakat dilokasi sekitar pembangunan TPA baru membutuhkan proses yang lama.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Dampak yang dapat terjadi bila tidak teratasinya kendala dan hambatan di atas secara baik diantaranya yaitu :

1. Kurang tercapainya target baik secara RPJM maupun RPJM Propinsi atau RPJM Pusat;
2. Kurang terlayannya masyarakat secara baik;
3. Bertambahnya masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi masalah dari sector lain seperti masalah kesehatan dan pendidikan;
4. Tingginya beban pencemaran lingkungan;
5. Menurunnya kualitas lingkungan;
6. Mengganggu pertumbuhan ekonomi;

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan urusan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

1. Peningkatan Jumlah penduduk
2. Arus urbanisasi penduduk

3. Jumlah Transportasi
4. Peningkatan Jumlah usaha/kegiatan
5. Alih Fungsi Lahan & status Lahan
6. Kondisi iklim
7. Teknologi
8. Respon Masyarakat dalam Media Sosial /
Melek Teknologi

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Untuk itu, perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan kinerja SDM aparatur dan reformasi birokrasi agar menjadi lebih baik di masa mendatang, antara lain :

1. Meningkatkan upaya penanganan dan pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah dalam rangka memperlambat usia TPA yang semakin pendek;
2. Meningkatkan intensifikasi pembinaan dan pendampingan terhadap upaya alih fungsi lahan untuk disertai upaya pemulihan lingkungan yang teralihkan fungsinya;
3. Mempercepat penetapan regulasi pengelolaan lingkungan baik yang terkait dalam meningkatkan PAD maupun pengelolaan pemulihan lingkungan;
4. Meningkatkan dan memperluas lokasi konservasi beserta ketersediaan vegetasi yang mampu mengendalikan penurunan kualitas lingkungan;
5. Melakukan inovasi dan kolaborasi dalam meningkatkan ketersediaan fasilitas dan sarpras pelayanan baik melalui pemeliharaan, perbaikan maupun CSR;
6. Meningkatkan intensifikasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam ikut terlibat secara aktif untuk mengelola lingkungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik No 81 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2026 Untuk Dinas Lingkungan Hidup mendapat pagu Anggaran Rp. 45m dengan terbagi untuk 8 program dimana adanya pembagian yang kurang proporsional dengan kebutuhan & penambahan beban kinerja didalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa sector diantaranya:

1. Ketidakseimbangan fasilitas pelayanan pelayanan persampahan / kebersihan dan vegetasi serta dekorasi RTH dengan penambahan lokasi pelayanan dan RTH;
2. Ketidakseimbangan Petugas Pelayanan dan Biaya Operasional akibat penambahan area pelayanan
3. Ketidaksesuaian penetapan target retribusi yang seharusnya berdasrakan potensi namu tidak terjadi sehingga target terlalu tinggi daan tingginya deviasi terhadap realisasi yang tercapai
4. Belum adanya kolaboratif yang optimal untuk seluruh pihak terutama dari pihak desa yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi ke Pemerintah Daerah tentang pengelolaan lingkungan diwilayahnya padahal di anggaran desa memiliki kewajiban untuk hal tersebut.
5. Kurangnya kapasitas SDM yang profesional dan meencukupi dalam pengelolaan LH terutama dalam hal pengawasan, pemantauan dan pengendalian dampak LH.

Tabel 2. 4 (TC 3.1) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gresik
Dinas Lingkungan Hidup

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp59.090.93 1.270				Rp98.147.31 8.020
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rerata Presentase Capaian Kinerja Program</i>	100 %	Rp18.967.85 3.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rerata Presentase Capaian Kinerja Program</i>	100 %	Rp19.024.24 0.350
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</i>	<i>7 Dokume n</i>	<i>Rp118.613.2 50</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</i>	<i>7 Dokume n</i>	<i>Rp175.000.0 00</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokume n	Rp18.397.00 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokume n	Rp50.000.00 0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	4 Laporan	Rp100.216.2 50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	4 Laporan	Rp125.000.0 00

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				<i>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN Aktif</i>	86 ORANG	Rp12.742.71 9.580	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN Aktif</i>	86 ORANG	Rp12.742.71 9.580
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	86 Orang/b ulan	Rp12.742.71 9.580	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	86 Orang/b ulan	Rp12.742.71 9.580
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Pekerjaan/ Kegiat an Internal PD yang terlayani</i>	4 paket	Rp626.240.1 05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Pekerjaan/ Kegiat an Internal PD yang terlayani</i>	4 paket	Rp626.240.1 05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	14 Paket	Rp71.772.73 7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	14 Paket	Rp71.772.73 7
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp7.476.168	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp7.476.168
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	11 Laporan	Rp257.733.2 00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	11 Laporan	Rp257.733.2 00

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	Rp289.258.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	Rp289.258.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlayani</i>	2 paket	Rp4.791.314.470	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlayani</i>	2 paket	Rp4.791.314.470
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48 Laporan	Rp169.524.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48 Laporan	Rp169.524.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	84 Laporan	Rp4.621.790.470	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	84 Laporan	Rp4.621.790.470
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	3 Paket	Rp688.966.195	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	3 Paket	Rp688.966.195

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>pemerintahan daerah yang terlayani</i>				<i>pemerintahan daerah yang terlayani</i>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 7 Unit	Rp254.926.7 95	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	127 Unit	Rp254.926.7 95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	81 Unit	Rp34.039.40 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	81 Unit	Rp34.039.40 0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	Rp400.000.0 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	Rp400.000.0 00
2,	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air dan Udara</i>	62 %	Rp100.000.0 00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air dan Udara</i>	62 %	Rp100.000.0 00

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah usaha/ Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</i>	816 Laporan	Rp100.000.0 00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah usaha/ Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</i>	816 Laporan	Rp100.000.0 00
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<i>Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)</i>	16 Lokasi	Rp100.000.0 00	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<i>Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)</i>	16 Lokasi	Rp100.000.0 00
	-	-	-	Rp100.000.0 00	-	-	-	Rp100.000.0 00
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter</i>	800 Paket	Rp864.913.3 00	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter</i>	800 Paket	Rp864.913.3 00

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>				<i>kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>		
3,	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase RTH yang terkelola Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH Persentase Tutupan Lahan Hijau</i>	0,017 % 0,286 rasio 80 % 8,01 %	Rp8.057.575 .200	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase RTH yang terkelola Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH Persentase Tutupan Lahan Hijau</i>	0,017 % 0,286 rasio 80 % 8,01 %	Rp8.057.575 .200
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	<i>Presentase kenaikan RTH Kabupaten</i>	0,42 %	Rp8.057.575 .200	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	<i>Presentase kenaikan RTH Kabupaten</i>	0,42 %	Rp8.057.575 .200
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	142,43 Ha	Rp5.269.723 .753	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	142,43 Ha	Rp5.269.723 .753
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>	68 Unit	Rp2.677.044 .447	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>	68 Unit	Rp2.677.044 .447
	Pengelolaan Taman	<i>Unit Taman Kehati</i>	3 Unit		Pengelolaan Taman	<i>Unit Taman Kehati</i>	3 Unit	

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Keanekaragaman Hayati Lainnya	<i>Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		Rp110.807.000	Keanekaragaman Hayati Lainnya	<i>Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		Rp110.807.000
4,	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH</i>	64 prosentase	Rp100.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH</i>	64 prosentase	Rp100.000.000
	[Meningkatkan Upaya Pengelolaan Limbah B3]	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	64	Rp100.000.000	[Meningkatkan Upaya Pengelolaan Limbah B3]	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	64	Rp100.000.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 Yang Sesuai Regulasi</i>	64 Laporan	Rp100.000.000	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 Yang Sesuai Regulasi</i>	64 Laporan	Rp100.000.000
	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan	<i>Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan</i>	64 Dokumen	Rp100.000.000	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan	<i>Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan</i>	64 Dokumen	Rp100.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	<i>dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</i>			dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	<i>dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</i>		
5,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH</i>	22 prosentase	Rp83.945.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH</i>	22 prosentase	Rp83.945.100
	[Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH]	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH	22	Rp83.945.100	[Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH]	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH	22	Rp83.945.100
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Ketaatan Dokumen</i>	52 Dokumen	Rp83.945.100	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Ketaatan Dokumen</i>	52 Dokumen	Rp83.945.100

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persetujuan LH</i>			Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persetujuan LH</i>		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	52 Dokumen	Rp83.945.100	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	52 Dokumen	Rp83.945.100
6,	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	61 prosentase	Rp267.890.200	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	61 prosentase	Rp267.890.200
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pendidikan / Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ komunitas</i>	235 Lembaga/ kelompok	Rp267.890.200	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pendidikan / Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ komunitas</i>	235 Lembaga/ kelompok	Rp267.890.200

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>	235 Lembaga	Rp267.890.200	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>	235 Lembaga	Rp267.890.200
7,	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara & badan air yang difasilitasi</i>	100 %	Rp175.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara & badan air yang difasilitasi</i>	100 %	Rp175.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengaduan yang terselesaikan dan Jumlah penerapan sanksi administratif</i>	54 pengadu an dan sanksi	Rp175.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengaduan yang terselesaikan dan Jumlah penerapan sanksi administratif</i>	54 pengadu an dan sanksi	Rp175.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota</i>	40 Pengadu an	Rp50.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota</i>	40 Pengadu an	Rp50.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>yang ditindaklanjuti/ di kelola</i>				<i>yang ditindaklanjuti/ di kelola</i>		
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	14 Sanksi	Rp125.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	14 Sanksi	Rp125.000.000
8,	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Persentase Pengurangan sampah Persentase Penanganan</i>	0,17 rasio 0,33 rasio 18,53 % 58,85 % 67 % 80 %	Rp31.338.667.170	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Persentase Pengurangan sampah Persentase Penanganan</i>	0,17 rasio 0,33 rasio 18,53 % 58,85 % 67 % 80 %	Rp70.338.667.170

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Sampah Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan</i>				<i>Sampah Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan</i>		
	Pengelolaan Sampah	<i>Presentase Sampah Yang terkelola</i>	77,38 %	Rp31.338.66 7.170	Pengelolaan Sampah	<i>Presentase Sampah Yang terkelola</i>	77,38 %	Rp70.338.66 7.170
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	20 Kelompo k	Rp298.758.0 00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	20 Kelompo k	Rp298.758.0 00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk</i>	18 Unit	Rp14.580.72 9.170	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk</i>	20 Unit	Rp62.080.72 9.170

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Kabupaten/Kota	<i>Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>			Kabupaten/Kota	<i>Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>		
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>	239,09 Ton	Rp2.203.955 .000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>	239,09 Ton	Rp2.203.955 .000
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	<i>Persentase luas layanan pengumpulan sampah</i>	58,85 Persenta se	Rp1.431.069 .000	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	<i>Persentase luas layanan pengumpulan sampah</i>	58,85 Persenta se	Rp1.431.069 .000
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan</i>	103,69 Ton	Rp4.324.156 .000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan</i>	103,69 Ton	Rp4.324.156 .000

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				<i>fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>		
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional</i>	210 Ton	Rp8.500.000 .000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional</i>	210 Ton	Rp8.500.000 .000
				Rp59.090.93 1.270				Rp98.147.31 8.020

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung (kelompok pecinta lingkungan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh secara langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum OPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Adapun usulan yang masuk untuk penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 baik dalam musrenbang kecamatan dan Forum PD serta usulan diluar forum tersebut diantaranya yaitu seperti :

1. Peningkatan dan Aktifasi Operasional TPST seperti Belahan Rejo Kedamean dan Kecamatan Tambak;
2. Pembangunan TPA baru;
3. Pembangunan & Peningkatan serta aktifasi Bank Sampah;
4. Peningkatan Ketersediaan Kelayakan Sarana Prsarana Persampahan seperti container, armroll tempat sampah terpilah, kompaktor, dll;
5. Peningkatan Pelayanan Pengangkutan Persampahan;
6. Pembangunan & Peningkatan RTH/Taman Tematik dan Pedukung;
7. Pengembangan dan Peeluasan Metode RDF di TPST

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berperan aktif dalam mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai subkegiatan yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rincian mengenai subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran
penguatan tata kelola persampahan										
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	200.000.000	23	205.931.532,58	25	213.493.624,68	27	224.189.031,34	29	231.033.245,37
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	235	201.025.000	250	206.987.000	265	214.588.000	280	225.338.000	295	232.217.000

3.1.2 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berperan strategis melalui berbagai subkegiatan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Subkegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup .

Melalui subkegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tidak hanya berkontribusi terhadap target pembangunan daerah, tetapi juga mendukung agenda nasional dalam mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon, peningkatan ketahanan iklim, serta penciptaan ekosistem yang sehat dan produktif. Dengan sinergi ini, diharapkan Kabupaten Gresik dapat menjadi bagian penting dari upaya nasional menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3.2 Dukungan Proyek Strategis Nasional

Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas /Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	
PROGRAM STRATEGIS NASINONAL = Pertumbuhan Ekonomi											
PROYEK PRIORITAS = Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan											
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	800	1.094.469.000	850	1.105.636.000	850	1.126.744.000	875	1.166.958.000	900	1.183.690.000	UPT Laborato rium
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	142,43	4.706.036.557	142,43	4.752.782.584	142,43	4.930.000.000	142,43	5.000.000.000	142,43	5.100.000.000	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	68	126.460.443	69	176.460.416	70	186.329.000	71	300.000.000	72	369.000.000	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman	3	115.500.000	3	165.500.000	3	165.500.000	3	246.433.000	3	246.759.000	Dinas Lingkung an Hidup

Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	
Hayati Lainnya											
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	64	100.512.00 0	66	103.493.00 0	68	107.294.00 0	70	112.669.00 0	72	116.109.00 0	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	52	171.586.00 0	54	176.675.00 0	56	183.162.00 0	58	192.338.00 0	60	198.210.00 0	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas	235	201.025.00 0	250	206.987.00 0	265	214.588.00 0	280	225.338.00 0	295	232.217.00 0	Dinas Lingkung an Hidup

Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	
/kelompok masyarakat											
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	40	25.127.930	42	25.873.165,5	44	26.823.264	46	28.167.031,5	48	29.026.936	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	14	25.128.070	16	25.872.834,5	18	26.823.736	20	28.166.968,5	22	29.027.064	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	200.000.000	23	205.931.532,58	25	213.493.624,68	27	224.189.031,34	29	231.033.245,37	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18	4.476.765.000	18	4.609.536.294,59	18	4.778.804.886,86	18	5.018.208.840,49	18	5.171.408.921,17	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	239,09	1.993.732.850,26	240,04	2.052.862.307,04	240,99	2.128.246.264,23	241,94	2.234.865.182,24	242,89	2.303.092.854,03	Dinas Lingkungan Hidup

Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	TARG ET	ANGGARAN	
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	58,85	1.294.568.301,55	58,9	1.332.962.171,83	58,95	1.381.910.395,46	59	1.451.140.067,62	59,05	1.495.441.580,32	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	103,69	3.911.698.848,19	105,83	4.027.710.693,96	107,95	4.175.613.828,77	110,08	4.384.799.878,31	112,2	4.518.662.399,11	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	210	7.200.000.000	400	7.413.535.000	410	7.685.770.000	410	8.070.805.000	410	8.317.196.000	Dinas Lingkungan Hidup

3.1.3 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas lingkungan hidup sebagai outcome prioritas, sekaligus mendukung terciptanya kemandirian bangsa dalam kerangka swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Seluruh upaya tersebut dijalankan dengan menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, DLH Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing.

Tabel 3.3 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

SubKegiatan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH
	2026		2027		2028		2029		2030		
	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
<i>Asta Cita : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</i>											
<i>Outcome PRIORITAS : Lingkungan Hidup yang berkualitas</i>											
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	800	1.094.469.000	850	1.105.636.000	850	1.126.744.000	875	1.166.958.000	900	1.183.690.000	UPT Laborator ium

SubKegiatan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH
	2026		2027		2028		2029		2030		
	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	40	25.127.930	42	25.873.165,5	44	26.823.264	46	28.167.031,5	48	29.026.936	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkuta n	239,09	1.993.732.850,26	240,04	2.052.862.307,04	240,99	2.128.246.264,23	241,94	2.234.865.182,24	242,89	2.303.092.854,03	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpula n sampah	58,85	1.294.568.301,55	58,9	1.332.962.171,83	58,95	1.381.910.395,46	59	1.451.140.067,62	59,05	1.495.441.580,32	Dinas Lingkung an Hidup

SubKegiatan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH
	2026		2027		2028		2029		2030		
	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposa n, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	103,6 9	3.911.698.8 48,19	105,8 3	4.027.710.6 93,96	107,9 5	4.175.613.8 28,77	110,0 8	4.384.799.8 78,31	112,2	4.518.662.3 99,11	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan	210	7.200.000.0 00	400	7.413.535.0 00	410	7.685.770.0 00	410	8.070.805.0 00	410	8.317.196.0 00	Dinas Lingkung an Hidup

[illegible]

Dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi ke-9 Jatim Lestari: “Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”;

Tabel 3. 4 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur 2025-2029

NSPK / SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi RPJMD Jatim Lestari	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)
Sasaran: Meningkatnya			Indeks Kuaitas Udara (IKU)
Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lahan (IKL)
NSPK DLH Provinsi Jawa Timur			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup		Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Respon Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK (%) – Kumulatif ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, iziin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Sinergitas antara Peraturan Bupati Gresik No 3 Tahun 2025 terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK No 129 Tahun 2024 terkait terkait Target Indeks KUalitas Lingkungan HidupnTahun 2024-2029.Adapun penyelarasan visi misi pemerintah daerah kabupaten Gresik dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat terlihat pada Matrik sinergitas kinerja dibawah ini.

Tabel 3. 5 Matrik Sinergitas Kinerja RPJMD Kabupaten Gresik dan RENSTRA 2025- 2029

Misi RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR
	Mewujudk an Lingkungan Hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)
Misi 1 = Memperkuat InsanGresik Unggul yang Sehat, Cerdas,Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	dan Sejahtera	Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat	Persentase RTH (Persentase)
			Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))
Misi ke-3 = Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Indah & Inklusif terhadap Kelompok Rentan	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjuta n	Indeks Kualitas Air
			Indeks kualitas Udara
			Indeks Kualitas Lahan
			Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry

Misi RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR
sertaTerintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.			Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)
Misi ke-5 = Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang sejahtera	Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan

Tabel 3. 6 Target terhadap Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR	TARGET TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
(04)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	65,16	65,24	65,32	65,4	65,48
Indeks Kualitas Udara (Indeks)	77,93	78,03	78,13	78,23	78,23
Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,68	61,78	61,88	61,98	61,98
Indeks Kualitas	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dapat terlihat pada tabel dibawah yaitu :

Tabel 3. 7 Target Sasaran Strategis di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,83	77,83	77,93	78,03	78,13	78,23	78,23
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,58	61,58	61,68	61,78	61,88	61,98	61,98
3.	Persentase	Persentas	12,07	12,07	12,49	12,91	13,33	13,74	14,15

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	RTH	e							
4.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan	%	67	67	67	67	68	68	68
5.	Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry	Rasio	6,67	6,67	7,14	8,33	9,09	10	11,11
6.	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup	%	80	80	80	80	80	80	80
7.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54
8.	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	25,66	25,66	26,65	27,63	28,61	29,59	30,58
9.	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan	%	14	14	29	29	29	43	43
10.	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	58,72	58,72	58,92	59,12	59,32	59,52	59,72

3.3 Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan hasil forum SKPD ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang di selenggarakan pada 22 Maret 2025, maka didapatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik akan melaksanakan 8 Program ,12 Kegiatan dan 29 sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

a PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DANEVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
2. Penyediaan barang cetakandan penggandaan
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor

e PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

a. PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.

C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

a PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA

1. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya
3. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman Hayati.

D. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

a PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

1. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

a PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

F. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

b PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan.

G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

a PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA.

1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN)

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
4. Penanganan sampah melalui pengangkutan
5. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

Adapun Perbandingan Program/Kegiatan Tahun 2025 dengan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 (T.C-33) Rumusan Rencana Program & Kegiatan Tahun 2026 & Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp59.090.931.270		Rp98.147.318.020
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rerata Presentase Capaian Kinerja Program</i>	100 %	Rp18.967.853.600	100 %	Rp19.024.240.350
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>Rp118.613.250</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>Rp175.000.000</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	Rp18.397.000	3 Dokumen	Rp50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	Rp100.216.250	4 Laporan	Rp125.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN Aktif</i>	86 ORANG	Rp12.742.719.580	86 ORANG	Rp12.742.719.580
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan</i>	86 Orang/bulan	Rp12.742.719.580	86 Orang/bulan	Rp12.742.719.580

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		<i>Tunjangan ASN</i>				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Pekerjaan/ Kegiatan Internal PD yang terlayani</i>	4 paket	Rp626.240.105	4 paket	Rp626.240.105
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	14 Paket	Rp71.772.737	14 Paket	Rp71.772.737
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	Rp7.476.168	1 Paket	Rp7.476.168
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	11 Laporan	Rp257.733.200	11 Laporan	Rp257.733.200
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	Rp289.258.000	1 Dokumen	Rp289.258.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlayani</i>	2 paket	Rp4.791.314.470	2 paket	Rp4.791.314.470
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya</i>	48 Laporan	Rp169.524.000	48 Laporan	Rp169.524.000

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		<i>Air dan Listrik yang Disediakan</i>				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	84 Laporan	Rp4.621.790.470	84 Laporan	Rp4.621.790.470
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlayani</i>	3 Paket	Rp688.966.195	3 Paket	Rp688.966.195
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	127 Unit	Rp254.926.795	127 Unit	Rp254.926.795
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	81 Unit	Rp34.039.400	81 Unit	Rp34.039.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3 Unit	Rp400.000.000	3 Unit	Rp400.000.000
2,	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan</i>	62 %	Rp100.000.000	62 %	Rp100.000.000

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		<i>Kualitas Air dan Udara</i>				
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah usaha/Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</i>	816 Laporan	Rp100.000.000	816 Laporan	Rp100.000.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<i>Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)</i>	16 Lokasi	Rp100.000.000	16 Lokasi	Rp100.000.000
	-	-	-	Rp100.000.000	-	Rp100.000.000
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>	800 Paket	Rp864.913.300	800 Paket	Rp864.913.300

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
3,	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase RTH yang terkelola Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH Persentase Tutupan Lahan Hijau</i>	0,017 % 0,286 rasio 80 % 8,01 %	Rp8.057.575.200	0,017 % 0,286 rasio 80 % 8,01 %	Rp8.057.575.200
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	<i>Presentase kenaikan RTH Kabupaten</i>	0,42 %	Rp8.057.575.200	0,42 %	Rp8.057.575.200
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	142,43 Ha	Rp5.269.723.753	142,43 Ha	Rp5.269.723.753
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>	68 Unit	Rp2.677.044.447	68 Unit	Rp2.677.044.447
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	<i>Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	3 Unit	Rp110.807.000	3 Unit	Rp110.807.000
4,	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	<i>Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan/ lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH</i>	64 prosentase	Rp100.000.000	64 prosentase	Rp100.000.000

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	BERACUN (LIMBAH B3)					
	[Meningkatnya Upaya Pengelolaan Limbah B3]	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	64	Rp100.000.000	64	Rp100.000.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 Yang Sesuai Regulasi</i>	64 Laporan	Rp100.000.000	64 Laporan	Rp100.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	<i>Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</i>	64 Dokumen	Rp100.000.000	64 Dokumen	Rp100.000.000
5,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/ Rekomendasi LH</i>	22 prosentase	Rp83.945.100	22 prosentase	Rp83.945.100

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	[Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH]	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH	22	Rp83.945.100	22	Rp83.945.100
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Ketaatan Dokumen Persetujuan LH</i>	52 Dokumen	Rp83.945.100	52 Dokumen	Rp83.945.100
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	52 Dokumen	Rp83.945.100	52 Dokumen	Rp83.945.100
6,	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	61 prosentase	Rp267.890.200	61 prosentase	Rp267.890.200
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pendidikan / Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ komunitas</i>	235 Lembaga/ kelompok	Rp267.890.200	235 Lembaga/ kelompok	Rp267.890.200

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ k omunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>	235 Lembaga	Rp267.890.200	235 Lembaga	Rp267.890.200
7,	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara & badan air yang difasilitasi</i>	100 %	Rp175.000.000	100 %	Rp175.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengaduan yang terselesaikan dan Jumlah penerapan sanksi administratif</i>	54 pengaduan dan sanksi	Rp175.000.000	54 pengaduan dan sanksi	Rp175.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola</i>	40 Pengaduan	Rp50.000.000	40 Pengaduan	Rp50.000.000
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan	<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang</i>	14 Sanksi	Rp125.000.000	14 Sanksi	Rp125.000.000

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	kabupaten/kota	<i>dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota</i>				
8,	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Persentase Pengurangan sampah Persentase Penanganan Sampah Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan</i>	0,17 rasio 0,33 rasio 18,53 % 58,85 % 67 % 80 %	Rp31.338.667.170	0,17 rasio 0,33 rasio 18,53 % 58,85 % 67 % 80 %	Rp70.338.667.170
	Pengelolaan Sampah	<i>Presentase Sampah Yang terkelola</i>	77,38 %	Rp31.338.667.170	77,38 %	Rp70.338.667.170
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan	<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat</i>	20 Kelompok	Rp298.758.000	20 Kelompok	Rp298.758.000

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	Persampahan	<i>atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>	18 Unit	Rp14.580.729.170	20 Unit	Rp62.080.729.170
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>	239,09 Ton	Rp2.203.955.000	239,09 Ton	Rp2.203.955.000
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	<i>Persentase luas layanan pengumpulan sampah</i>	58,85 Persentase	Rp1.431.069.000	58,85 Persentase	Rp1.431.069.000
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas</i>	103,69 Ton	Rp4.324.156.000	103,69 Ton	Rp4.324.156.000

NO	PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		<i>lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>	210 Ton	Rp8.500.000.000	210 Ton	Rp8.500.000.000
				Rp59.090.931.270		Rp98.147.318.020

BAB IV

RENCANA KERJA & PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan hasil forum SKPD ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2026 merencanakan akan melaksanakan 8 Program , 12 Kegiatandan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian Program & Kegiatan beserta Pendanaannya sebagaimana terdapat pada table 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						59.955.844.570,00							100.095.594.837,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						59.955.844.570,00							100.095.594.837,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						59.955.844.570,00							100.095.594.837,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Pelayanan Perkantoran	-			100 prosentase	18.967.853.600,00						-	17.388.960.795,00	
		[Meningkatkan ketercapaian sasaran program OPD]	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	100	100	18.967.853.600,00	-	-	-	-	-	-	17.388.960.795,00	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-			7 Dokumen	118.613.250,10			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan an #PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD	-	237.226.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	18.397.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan #PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		118.613.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	100.216.250,10	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan #PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		118.613.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Aktif	-			84 ORANG	12.742.719.579,90			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan #PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD	-	10.981.769.559,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	12.742.719.579,90	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan #PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		10.981.769.559,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.476.168,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		14.952.336,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84 Laporan	257.733.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	169.524.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	#PESONA_ GRESIK Pe mbangunan Ekologi Ber kelanjutan didukung P engembang an Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		149.998.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84 Laporan	4.621.790.470,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	#PESONA_ GRESIK Pe mbangunan Ekologi Ber kelanjutan didukung P engembang an Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Pegawai OPD		4.755.014.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				60 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lokasi atau pelaku usaha		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	-	-	-	-	964.913.300,00	-	-	-	-	-	-	1.238.252.000,00	-
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				800 Dokumen	864.913.300,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lokasi atau pelaku usaha		1.113.252.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Prosentase RTH yang dikelola , 2. " Prosentase Tutupan Lahan Hijau 3. Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia</i>	-			0,017% prosentase	8.057.575.200,00						-	7.722.766.662,00	
		[Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau]	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH Persentase RTH yang dikelola Persentase Tutupan Lahan Hijau Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia	0.017 0.429 80 8.05	0.017 0.143 80 8.00	0.017 0.167 80 8.00	0.017 0.286 80 8.01	8.057.575.200,00	-	-	-	-	-	-	7.722.766.662,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan RTH Kabupaten	-			0,01 prosentase	8.057.575.200,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an #PESONA_ GRESIK Pe mbangunan Ekologi Ber kelanjutan didukung P engembang an Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Lokasi	-	7.722.766.662,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				142,42 Ha	5.269.723.753,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mew ujudkan Pe mbangunan Berkelanjut an #PESONA_ GRESIK Pe mbangunan Ekologi Ber kelanjutan didukung P engembang an Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Lokasi		4.965.092.385,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				67 Unit	2.677.044.447,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan #PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Lokasi		2.427.044.447,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Unit	110.807.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	Lokasi		330.629.830,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	-			64 prosentase	100.000.000,00						-	125.000.000,00	
		[Meningkatkan Upaya Pengelolaan Limbah B3]	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	72	60.5	62	64	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	125.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 Yang Sesuai Regulasi</i>	-			64 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	#PESONA, GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	uasaha/kegiatan/loka si	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)													
			<i>Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</i>				75 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	#PESONA, GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	uasaha/kegiatan/loka si		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH</i>	-			22 prosentase	83.945.100,00						-	125.000.000,00	
		[Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH]	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH	30	18	20	22	83.945.100,00	-	-	-	-	-	-	125.000.000,00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pendidikan /Masyarakat/Kelompok Masyarakat/komunitas	-			235 Lembaga/kelompok	267.890.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembeda pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lembaga/kelompok masyarakat	-	500.999.898,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				180 Lembaga	267.890.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembeda pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lembaga/kelompok masyarakat		500.999.898,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	"1. Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi; 2. Persentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi "	-			100 prosentase	175.000.000,00						-	274.999.600,00	
		[Optimalisasi Pengelolaan Penanganan Aduan LH]	Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi Persentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi	100	100	100	100	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	274.999.600,00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				14 Sanksi	125.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_GRESIK Pembangunan Ekologi Berkelanjutan didukung Pengembangan Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lokasi/usaha/kegiatan		199.999.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>"1. Prosentase Penanganan Sampah 2. Prosentase Pengurangan Sampah 3. Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan 4. Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan 5. Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa"</i>	-			58,85 prosentase	31.338.667.170,00						-	72.719.615.882,00	
		[Meningkatkan Upaya Pengelolaan Persampahan]	Persentase Penanganan Sampah Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan Persentase Pengurangan sampah Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan	0.22 0.33 0.5 18.57 59.05 68 80	0.17 0.25 0.33 18.51 58.7 67 80	0.17 0.25 0.33 18.52 50 58.8 80	0.17 0.25 0.33 18.53 58.85 67 80	31.338.667.170,00	-	-	-	-	-	-	72.719.615.882,00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				160 Unit	7.959.180.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantap an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_ GRESIK Pe mbangunan Ekologi Ber kelanjutan didukung P engembang an Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lokasi dan masyarakat		8.149.609.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	-	-	-	-	31.338.667.170,00	-	-	-	-	-	-	72.719.615.882,00	-
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				210 Ton	8.500.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantap an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	#PESONA_ GRESIK Pe mbangunan Ekologi Ber kelanjutan didukung P engembang an Ekowisata, Budaya dan Industri Ramah Lingkungan	lokasi dan masyarakat		6.444.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H							59.955.844.570,00							100.095.594.837,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik Tahun 2026 ini disusun berdasarkan visi misi Kabupaten Gresik yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kabupaten Gresik. Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparatur dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik Tahun 2026 ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun anggaran 2026 ini disampaikan kepada Bupati Kabupaten Gresik sebagai wujud

pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

KEPALA DINAS LINGKUNGANHIDUP
KABUPATEN GRESIK



SRI SUBAIDAH, ST., MT
PEMBINA TK. I
NIP.197111131999012002